

No. 158 Maret - April 2019

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



HERLINA SILUBUN
PENGABDIAN GURU UNTUK
ANAK-ANAK ASMAT
(Bagian I)

MENDUNIA
DENGAN KOMIK
MELAWAN
PERUNDUNGAN

MENGALANG KOMITMEN
UNTUK KEADILAN DAN
KESETARAAN GENDER

SRIKANDI-SRIKANDI
PENDIDIKAN
DARI BEA NANGA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL

Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**NEWS**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

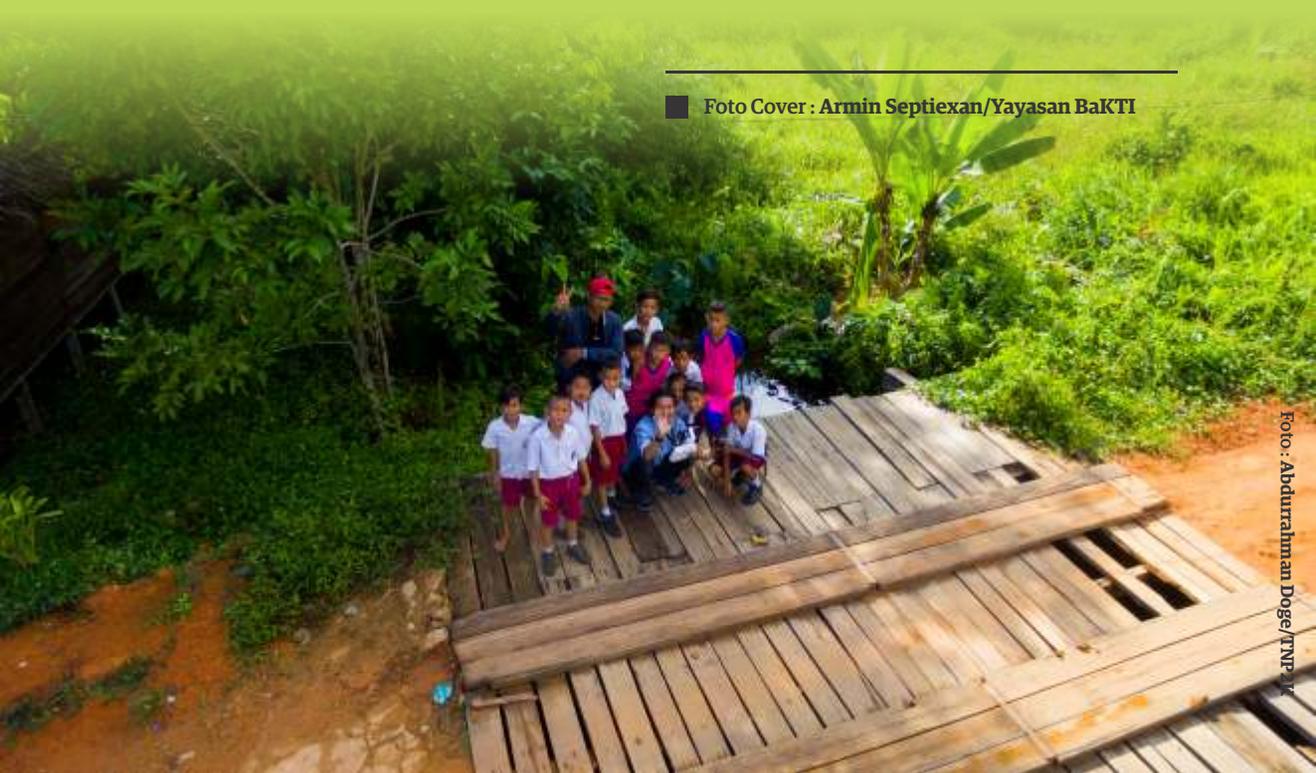
BaKTI News

Maret - April 2019

No. 158

- 1** Herlina Silubun
Pengabdian Guru untuk Anak-Anak
Asmat (Bagian 1)
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 5** Replikasi PKSAI untuk
Kesejahteraan Lebih Banyak Anak
Oleh **ARAFAH**
- 9** Media dan Pemerintah
Lawan Hoaks Lewat Jurnalisme Data
Oleh **SHAFIRA AMALIA**
- 12** Semangat Mama Emi
Memperkenalkan BANGGA Papua
Oleh **SYAIFULLAH**
- 16** Reses Partisipatif
Mengefektifkan Fungsi Anggota DPRD
Oleh **IBRAHIM FATTAH**
- 20** Asmanak dan Ume Bubu
Oleh **JOANIVITA PAULO GULO SORU**
- 24** Menengok RSUD Paniai,
Rujukan di Mee Pago
Oleh **SYAIFULLAH**
- 27** Menggalang Komitmen untuk
Keadilan dan Kesetaraan Gender
Oleh **LUSIA PALULUNGAN**
- 31** Mendunia dengan Komik
Melawan Perundungan
Oleh **MUGRNIAR MARAKARMA**
- 34** Srikandi-Srikandi Pendidikan
dari Bea Nanga
Oleh **MAKHRUS YUSAK**
- 38** Update Batukarinfo
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

Foto Cover : Armin Septiexan/Yayasan BaKTI



Herlina Silubun

Pengabdian Guru untuk Anak-Anak Asmat

(Bagian 1)

Oleh **PETRUS SUPARDI**

Foto: Petrus Supriadi / Yayasan BaKTI

“Saya memiliki moto hidup, ‘berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik untuk sesama. Saya mau orang yang berada di sekitar saya, baik para guru maupun anak-anak Asmat mendapatkan pelayanan terbaik dari saya. Karena itu saya selalu bekerja dengan tekun, setia, jujur, dan terbuka”.

Herlina Sopia Silubun,
Kepala SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam.

Siapa tidak mengenal Asmat? Salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki bentang alam yang cukup unik diliputi oleh tanah lumpur dan rawa-rawa sehingga segala aktivitas berlangsung di atas papan. Orang Asmat terbiasa mengambil makanan di alam, tinggal berminggu-minggu untuk mencari makanan. Sesudahnya, mereka kembali ke kampung. Setelah persediaan makanan habis, mereka akan pergi ke dusun lagi.

Pada saat orang tua pergi ke dusun, mereka membawa serta anak-anak sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti pendidikan formal di sekolah dasar yang ada di kampung. Orang tua membawa anak-anak ke dusun. Di sana, orang tua mengajari anak-anak untuk berjuang hidup dan mencari nafkah. Orang tua menunjukkan batas-batas dusun dan tempat mencari makanan. Orang tua juga mengajari berbagai pengetahuan praktis kepada anak-anak. Semua berlangsung di dusun.

Bagi sebagian guru, kondisi sosial, budaya, adat-istiadat orang Asmat merupakan kendala dalam mendidik generasi Asmat. Namun, bagi Herlina, kondisi hidup orang Asmat justru menantang dirinya untuk semakin rendah hati dalam melayani anak-anak Asmat. Sebagai pribadi yang sudah menyatu dengan tanah lumpur Asmat dirinya memahami perilaku hidup orang Asmat.

Di Ayam, Herlina tinggal di rumah guru yang terletak di kompleks sekolah. Di rumah sederhana itu, Herlina tinggal bersama suami dan ketiga anaknya. Di rumah itu pula, tidak jarang Herlina menerima anak-anak yang belum lancar membaca, menulis dan berhitung untuk datang belajar pada sore hari. Untuk menopang ekonomi keluarga, Herlina membuat kios kecil yang menyediakan kebutuhan masyarakat sekitar.

Kampung Ayam adalah pusat dari Distrik Akat. Kampung ini terletak jauh dari Agats, ibukota Kabupaten Asmat. Ayam dapat dicapai dengan menyusuri sungai Asuwets menggunakan *speedboat* selama satu jam.

Pada 16 Februari 2018, tim KOMPAK-LANDASAN yang terdiri atas Heracles Lang, George Corputty mengunjungi Ayam. Pastor Paroki St. Martinus de Pores Ayam, Pastor Vesto Maing, Pr menemani tim LANDASAN mengunjungi Puskesmas, Kantor Distrik dan SD YPPK St. Martinus de Pores.

Usai mengunjungi Puskesmas Ayam dan Kantor Distrik, tim mengunjungi SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. SD Martinus berdiri sejak tahun 1950-an. Sekolah ini didirikan oleh para misionaris Ordo Salib Suci dari Amerika. Meskipun demikian, sekolah dalam kondisi memprihatinkan.

Saat melakukan kunjungan, tim KOMPAK-LANDASAN melihat kondisi WC sekolah yang rusak, ruang perpustakaan tidak berfungsi, dan sampah menumpuk di depan sekolah. Bagian belakang sekolah ditumbuhi rumput dan pohon yang tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Donatus Tamot hadir menemani tim KOMPAK LANDASAN. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengangkat orang muda, Ibu Herlina Sopia Silubun sebagai Kepala Sekolah Dasar YPPK St. Martinus de Pores Ayam. “Saya tempatkan anak murid saya dulu di KPG Merauke sebagai kepala sekolah di sini. Saya percaya dia bisa memperbaiki sekolah ini,” tutur Don penuh optimis.

Pada kesempatan itu, Don minta supaya SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam, SD YPPGI Ayam dan SD Persiapan Cumnew terlibat dalam kegiatan pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilaksanakan oleh LANDASAN Papua di Agats pada 19-20 Februari 2018.

Herlina dan salah satu gurunya mengikuti kegiatan MBS tersebut di Agats. Tatkala materi yang dijelaskan belum dipahaminya, ia bertanya dan meminta penjelasan kepada narasumber yang menyajikan materi. “Waktu ikut kegiatan MBS, saya sungguh mau belajar supaya bisa perbaikan SD YPPK St. Martinus de Pores,” tuturnya singkat.



Foto : N.J. Tangkepuyung /Yayasan BaKTI

Herlina Sopia Silubun, perempuan peranakan Kei-Jawa. Ayahnya, Edmundus Silubun berasal dari Kei Besar. Ibunya Agustina Siti Hotija berasal dari Jawa. Herlina lahir di Merauke pada 9 September 1987. Ia lahir sebagai anak ketiga dari enam bersaudara.

“Waktu kecil, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi guru. Saya mau menjadi Suster biarawati. Tetapi, bapak saya tidak merestui, sehingga waktu selesai SMP YPPK St. Yohanes Pemandi Agats tahun 2003, saya melamar ke Kolose Pendidikan Guru (KPG) Merauke dan lulus. Sejak saat itu, saya belajar mencintai panggilan sebagai guru,” tutur Herlina dengan mata berkaca-kaca mengenang kembali masa-masa dirinya harus memutuskan pilihan hidupnya itu.

Seiring berlalunya waktu, Herlina memaknai bahwa kepergian dirinya dari Agats ke Merauke untuk bersekolah di KPG Merauke merupakan panggilan Tuhan. Selama tiga tahun, ia belajar menjadi guru bagi orang Papua, khususnya adik-adiknya di Asmat. Ia memiliki tekad kuat untuk mendedikasikan seluruh hidupnya bagi anak-anak Asmat.

Herlina memiliki cinta yang besar bagi anak-anak Asmat. Setelah menamatkan pendidikan gurunya di KPG Merauke pada tahun 2008, ia kembali ke Agats. “Saya sudah menjadi bagian dari orang Asmat, sehingga saya bertekad

mengabdikan diri saya untuk kemajuan orang Asmat melalui pendidikan. Saya mau adik-adik saya di Asmat bisa mendapatkan pendidikan berkualitas,” tutur Herlina yang menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD YPPK Salib Suci Agats pada tahun 2000 ini.

Nurani Melayani

Tahun 2008, setelah menyelesaikan pendidikan guru di KPG Merauke, Herlina mengajar di SD Inpres Syuru. Ia mengajar di SD Inpres Syuru hanya enam bulan. Sesudahnya, ia pindah ke SD Inpres Yuni, Distrik Akat, tahun 2009-2010, dengan status sebagai guru kontrak.

Tahun 2010, pemerintah daerah Kabupaten Asmat membuka tes formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Herlina mengikuti tes tersebut di Agats. Hasilnya, ia lulus menjadi guru PNS. Setelah lulus, ia masih tetap mengabdikan diri di SD Inpres Yuni sampai dengan akhir tahun 2010.

Pengalaman perjumpaan dengan anak-anak Asmat di SD Inpres Yuni semakin memurnikan motivasi Herlina menjadi guru. Ia bertekad memberikan seluruh hidupnya untuk anak-anak Asmat. Ia mau supaya anak-anak Asmat bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.

Herlina mengungkapkan bahwa ketidakhadiran guru di sekolah menyebabkan anak-anak terlantar. Mereka tidak bisa



mengenyam pendidikan. Pengalamannya ini memotivasi dirinya untuk memberikan seluruh hidupnya demi kemajuan pendidikan bagi anak-anak Asmat.

“Kondisi anak-anak di SD Inpres Yuni, yang tidak bisa bersekolah karena tidak ada guru membuat saya semakin menghayati panggilan saya sebagai guru. Situasi itu membuat saya berjanji pada diri saya sendiri untuk menjadi guru yang baik bagi anak-anak Asmat,” tambah Herlina.

Dari SD Inpres Yuni, Herlina pindah ke SD Negeri Mbait. Selama tahun 2011-2015, ia mengajar di SD Negeri Mbait.

Tahun 2015, Herlina pindah lagi ke Distrik Akat. Ia mengajar di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. Ia menjadi salah satu guru muda di sekolah itu. Meskipun masih muda, Herlina percaya diri dalam mengajar. Ia berusaha mendidik anak-anak Asmat agar bisa seperti anak-anak di kota. Mereka bisa membaca, menulis dan berhitung.

“Saya punya prinsip melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saya tidak mau mencampuri urusan guru lain. Sebab, semua guru harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu, sebagai guru kelas, saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak Asmat,” tutur Herlina.

Ketulusan Herlina dalam mendidik anak-anak Asmat mendapatkan perhatian dari Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Asmat, Donatus Tamot. Meskipun dari segi kepangkatan belum memenuhi syarat sebagai kepala sekolah, tetapi Herlina mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Kepala SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam.

Pada 14 November 2017, Herlina Sopia Silubun dilantik menjadi Kepala SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. “Waktu saya dengar bahwa saya ditunjuk menjadi kepala sekolah, saya sudah menolak. Saya masih muda. Masih ada guru yang lebih senior. Saya juga lebih senang mengajar anak-anak. Saya merasa sudah cukup menjadi guru kelas,” tutur Herlina.

Meskipun sempat menolak, akhirnya Herlina harus menerima penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Don Tamot. Ia hadir pada hari pelantikan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK - LANDASAN II dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Replikasi PKSAI

untuk Kesejahteraan Lebih Banyak Anak

Oleh **ARAFAH**

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya konkrit untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan anak. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Lima tahun setelah Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak dikeluarkan, Kementerian Sosial dengan dukungan UNICEF memulai inisiatif model terpadu pelayanan untuk anak rentan dan anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Inisiatif yang disebut Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) diujicobakan di wilayah Tulungagung, Surakarta, Klaten, Makassar dan Gowa.



PKSAI adalah upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak. Berdasarkan materi yang dipaparkan oleh narasumber dari Kementerian Sosial RI, bahwa pelaksanaan PKSAI memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kasus yang direspon. Anak-anak rentan lima kali lebih mungkin mendapatkan akses terhadap layanan melalui PKSAI. Kementerian Sosial akan mereplikasi pengembangan PKSAI di tiga lokasi baru di Sulawesi Selatan yaitu di Bulukumba, Maros, dan Pare-Pare.

Ada beberapa layanan utama dari model PKSAI. Pertama, layanan responsif atau tersier bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti korban kekerasan atau penelantaran. Kedua, layanan penguatan keluarga dan anak yang berada dalam situasi rentan dan miskin, seperti anak yang bekerja, anak buruh migran, putus sekolah, tanpa identitas hukum, yang membutuhkan rujukan ke beragam pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang sesuai.



Foto : Arafah/Yayasan BaKTI

Pelaksanaan PKSAI ini adalah salah satu dari wujud implementasi SPA (Sistem Perlindungan Anak) karena SPA itu berfungsi untuk melayani dan merespon kasus. SPA inilah yang harus didorong, agar nantinya anak-anak tidak menjadi korban perlakuan salah, dan sebagainya.

Hal ketiga adalah inisiatif untuk mengidentifikasi risiko kerentanan anak dari tingkat desa. Hal ini untuk memastikan anak rentan untuk menerima layanan secepatnya. Rujukan dan layanan yang disediakan dalam model PKSAI bertujuan untuk menghubungkan layanan perlindungan anak (seperti bantuan psikososial, pengasuhan alternatif dan bantuan hukum serta pendampingan bagi anak berkonflik dengan hukum), layanan penguatan keluarga (seperti konseling keluarga), dengan layanan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar.

Transformasi Perjalanan PKSAI

PKSAI memiliki cerita perjalanan yang cukup panjang, mulai dari perubahan nama sampai pada payung hukum yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Pada tahap awal, PKSAI diberi nama Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini lahir tahun 2010 karena ada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan. PKSA, didukung juga dengan Keputusan Kementerian Sosial Pedoman Umum tentang PKSA. Program ini memiliki lima klastering yakni klaster anak balita, anak berhadapan hukum, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk korban-korban perlakuan salah, penelantaran, dan pelecehan seksual. Dengan adanya PKSA, lahirlah mitra Kemensos, seperti LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Setiap klaster permasalahan anak itu memiliki mitra yang berbeda.

Pada awal dibentuk PKSA bertujuan memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak anak agar mereka bertumbuh



Foto : Arafah/Yayasan BaKTI

kembang secara optimal dengan meminimalisir jumlah anak yang menjadi korban penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, dan tindak kekerasan lainnya. Pada tahun 2014, Kementerian Sosial melakukan kajian; masihkah PKSA dibutuhkan? Program ini mendampingi anak-anak, merespon dengan tiga macam intervensi yaitu primer, sekunder, dan tersier. Hanya saja selama ini memang kebanyakan melakukan di area tersier. Jadi ketika ada kasus barulah bekerja.

Paradigma ini harus berubah, jadi tidak hanya tersier tetapi juga bagaimana meminimalisir tersier ini agar jangan sampai selalu lebih besar. Idealnya adalah layanan primerlah yang seharusnya lebih besar. Untuk apa intervensi primer ini? Tentu saja untuk semua anak tanpa kecuali. Merujuk kajian tersebut jumlah kapasitas Peksos untuk mendampingi lembaga-lembaga yang sebenarnya masih banyak yang belum tersentuh. Secara otomatis masih banyak anak yang juga belum ikut tersentuh.

Pada fakta perjalanannya, Peksos tidak mampu menangani semuanya dan tentunya membutuhkan manajemen kasus. Oleh karena itu dibutuhkan pihak-pihak yang juga menangani sasaran yang sama yaitu anak meskipun anaknya berbeda. Lalu dari sisi integrasi, bagaimana selama ini PKSA tidak sampai ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota? Selama ini PKSA melewati Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan langsung ke provinsi.

Padahal seharusnya ada rekomendasi dari Kabupaten/Kota dan provinsi. Inilah yang menjadi masukan - masukan sehingga bisa mengoptimalkan integrasi dengan Kabupaten/Kota karena sebenarnya yang memiliki wilayah tersebut adalah Kabupaten/Kota itu sendiri.

Pada tahun 2016 PKSA berubah menjadi PKSAI. Tujuan dari PKSAI ini adalah agar anak-anak bisa terlayani dengan baik. Pelaksanaan PKSAI ini adalah salah satu dari wujud implementasi SPA (Sistem Perlindungan Anak) karena SPA itu berfungsi untuk melayani dan merespon kasus. SPA inilah yang harus didorong, agar nantinya anak-anak tidak menjadi korban perlakuan salah, dan sebagainya.

Replikasi PKSAI di Sulawesi Selatan

Hingga sekarang PKSAI telah diujicoba pada lima wilayah yang ada yaitu di tiga provinsi, pertama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Replikasi PKSAI di tiga wilayah diharapkan mampu membangun mekanisme di tingkat masyarakat untuk mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak dalam komunitas mereka yang rentan terhadap kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi, dan merujuk mereka ke pelayanan anak integratif. Pengembangan PKSAI diharapkan tidak sekedar penambahan jumlah wilayah target semata,



Foto : Arafah/Yayasan BaKTI

namun pada pemenuhan kebutuhan layanan kesejahteraan sosial anak yang maksimal dan memadai.

Untuk mempersiapkan strategi implementasi PKSAI, UNICEF melalui Yayasan BaKTI telah memfasilitasi kegiatan Workshop Pengembangan PKSAI di Bulukumba, Maros dan Parepare. Workshop pengembangan PKSAI ini diselenggarakan selama pada akhir Januari 2019 dan diikuti oleh 43 orang peserta. Peserta workshop berasal dari Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Provinsi, DP3A Provinsi, Kabupaten Bulukumba, Maros dan Pare-Pare.

Pengembangan PKSAI di wilayah baru merupakan rekomendasi dari Kementerian Sosial RI, dengan target 116 wilayah baru di seluruh Indonesia. Perluasan PKSAI diharapkan dapat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang menjadi tugas dan kewenangan Kemensos.

Tantangan Pengembangan PKSAI

Berbicara pengembangan atau perluasan PKSAI, tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Misalnya kapasitas sumberdaya manusia. Saat ini jumlah pekerja sosial yang terbatas belum memungkinkan PKSAI untuk melaksanakan layanan proaktif dan kegiatan penjangkauan. Juga terdapat isu terkait mekanisme kontrak jangka pendek dan

penerimaan gaji staf garis depan yang belum teratur. Tingginya pergantian personil memengaruhi arus informasi dan tindak lanjut dari komitmen yang telah dibuat.

Ada kebutuhan untuk meninjau mekanisme koordinasi dan anggota tim saat ini. Hal ini terutama terjadi pada kasus Gowa dan Makassar. Kepemimpinan yang kompeten sangat penting untuk pengoperasian PKSAI. Anggaran yang tidak optimal menjadi tantangan dalam perencanaan yang tidak optimal untuk mendukung layanan.

Lokasi yang mudah diakses dan khusus disiapkan untuk menjadi kantor sekretariat PKSAI juga merupakan faktor penting lainnya dalam memberikan layanan terbaik bagi aktivitas perlindungan anak yang terintegrasi. Tentu saja hal-hal ini akan dapat ditangani dengan baik jika Kepala Daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di daerahnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Program UNICEF - BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Media dan Pemerintah Lawan Hoaks Lewat Jurnalisme Data



Oleh **SHAFIRA AMALIA**

Hoaks atau berita bohong saat ini telah menjadi masalah besar. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menunjukkan ada lebih dari 800.000 situs yang terindikasi menyebarkan berita dan informasi palsu. Sementara itu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan, ada peningkatan distribusi hoaks secara drastis, dari rata-rata 10 hoaks per bulan pada 2015 menjadi 94 hoaks per bulan atau sekitar tiga hoaks per hari.

Adanya krisis disinformasi seperti ini mendorong Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia untuk mengatasi masalah hoaks ini dengan menginisiasi *jurnalismedata.id*, sebuah laman berisikan semua data pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) penyedia data terbuka. Laman ini adalah hasil kerja sama dengan Satu Data Indonesia, portal resmi data terbuka Indonesia yang berisi data lintas kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan semua instansi lain yang terkait yang menghasilkan data tentang Indonesia.

“Pemerintah itu sebenarnya sudah terbuka dengan data-datanya. Mereka sudah transparan tapi datanya masih tersebar. Karena itu, tidak semua orang menyadari bahwa mereka bisa mengakses data ini,” ujar Revolusi Riza, Sekretaris Jenderal AJI pada acara peluncuran *jurnalismedata.id* di Jakarta pada awal Januari silam.

Pengumpulan data-data pemerintahan dalam satu wadah ini diharapkan dapat mempermudah publik dalam membantu melawan keberadaan disinformasi atau berita palsu, ujar Revolusi. Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, laman ini juga bertujuan membantu publik untuk ikut mengawasi pemerintahan lewat jurnalisme yang berbasis data.

“Sebetulnya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran hoaks yang merajalela di internet dan media sosial. Namun, upaya pemerintah dalam mengimplementasikan keterbukaan di pemerintahan tidak cukup,” ujarnya.



Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi jurnalisme data adalah bagaimana membuat publik lebih tertarik untuk membaca beritanya daripada hoaks yang lebih mudah dicerna.

Terkait kekhawatiran publik mengenai privasi mereka terkait keterbukaan data pemerintah lewat *jurnalismedata.id*, Yanuar mengatakan pemerintah telah menetapkan batasan-batasan. “Jika kita membahas keterbukaan data, perlindungan data juga pasti dibahas. Nama, alamat dan data personal lainnya tidak mungkin dibuka untuk publik,” ujarnya.

Selain membantu akses publik terhadap data pemerintahan, para pengggagas *jurnalismedata.id* ingin melawan hoaks dengan cara meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Laman ini memberikan sarana pembelajaran gratis bagi jurnalis yang ingin mendalami model jurnalisme data lewat kursus daring gratis, aneka perangkat (*tools*) terkait, serta seminar daring atau webinar.

“*Data driven journalism* berbeda dengan metode jurnalisme yang konvensional. Informasi yang digunakan tidak lagi dari wawancara, mengambil dari artikel yang pernah diliput sebelumnya atau melihat sendiri kejadiannya,” ujar Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi Tempo.co sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia.

“Jurnalisme data menuntut wartawan untuk memahami bagaimana mengolah data menjadi narasi atau cerita. Metode jurnalisme seperti ini akan membantu kualitas liputan dan akurasi untuk lebih baik lagi,” tambahnya.

Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi jurnalisme data adalah bagaimana membuat publik lebih tertarik untuk membaca



Foto : freestock.org

beritanya daripada hoaks yang lebih mudah dicerna. Dalam hal ini, Aghnia Adzkia, jurnalis data Beritagar.id mengatakan bahwa jurnalisme data bukan berarti harus membosankan.

“Padahal *soft news* juga bisa ditulis berdasarkan data, loh. Saya pernah kok membuat sebuah artikel tentang karakter-karakter pasangan dalam film Indonesia, yakni Dilan dan Milea, Rangga dan Cinta, dan Galih dan Ratna. Saya bandingkan siapa yang paling sering merayu di dalam film-film tersebut,” ujar Aghnia dalam diskusi di acara peluncuran.

“Artikel berdasarkan data tidak selalu harus angka yang keras dan terlalu serius, artikel ‘receh’ pun bisa berdasarkan data.” Wahyu menambahkan, model jurnalisme data memunculkan tantangan baru bagi perusahaan media dalam merekrut sumber daya manusia.

“Media sangat bisa berkontribusi, terutama di dalam standar rekrutmen. Prioritaskan jurnalis yang tidak hanya kritis di lapangan, tetapi yang juga paham cara mengolah data dan menganalisis,” ujarnya.

“Kita juga harus membiasakan publik untuk menerima informasi yang bersifat lebih kompleks dari yang biasa mereka cerna setiap hari. Seperti yang dikatakan Aghnia, itulah salah satu alasan mengapa hoaks lebih gampang diterima dan menyebar di media sosial,” lanjutnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Magdalene.co dan dapat dibaca pada link berikut <https://magdalene.co/news-2059-media-dan-pemerintah-lawan-hoaks-lewat-jurnalisme-data.html>



Foto : Syaifullah /Yayasan BaKTI

Semangat Mama Emi Memperkenalkan **BANGGA** Papua

Oleh **SYAIFULLAH**

E narotali adalah ibu kota Kabupaten Paniai, Papua yang terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Kota kecil yang biasanya sejuk, siang itu terasa gerah. Namun, tidak menghalangi ratusan orang yang berkumpul di halaman Bank Papua yang berada di lingkungan pasar Enarotali, tepat di jantung kota itu. Sebagian besarnya adalah ibu-ibu. Ada yang datang sendirian, ada pula yang datang dengan membawa anak mereka yang masih kecil.

Di bawah tenda yang dibangun di atas lantai semen di halaman Bank Papua, para ibu duduk tenang dan rapi. Tetap tenang dan menuruti instruksi dari seorang perempuan bertubuh kecil yang sedari tadi nampak sibuk berteriak mengatur mereka dalam bahasa Moni.

Perempuan itu adalah Emiliana Zonggonau, kerap disapa Mama Emi. Usianya 50an tahun, berperawakan mungil dengan rambut keriting halus yang dipotong pendek. Berkaos polo warna biru lengan panjang dengan topi berlogo BANGGA Papua di kepalanya, Mama Emi memegang



Foto : Syaifulah / Yayasan BaKTI

"Pelatihan ini sangat membantu meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan sosialisasi. Terutama dalam melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada calon penerima manfaat BANGGA Papua", kata Mama Emi ketika mengikuti pelatihan ToT komunikasi tingkat lanjut.

beberapa lembar kertas dan berdiri di depan ibu-ibu yang duduk di bawah tenda. Kertas yang dipegangnya berisi nama-nama ibu penerima manfaat BANGGA Papua dari tempat tinggalnya, Distrik Bibida di Paniai.

Kamis, 13 Desember 2018 adalah hari pertama pembayaran dana BANGGA Papua kepada penerima manfaat di Kabupaten Paniai. Pembayaran tersebut dilakukan di halaman samping kantor Bank Papua Cabang Enarotali. Selama seminggu lebih, Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua Kabupaten Paniai bekerjasama dengan Bank Papua membayarkan dana untuk 2.711 penerima manfaat di titik pembayaran Enarotali. Para penerima manfaat itu datang dari 13 distrik yang berada di sekitar Enarotali. Bibida salah satunya.

Mama Emi, meski bertubuh kecil, suaranya lantang dan berkarakter kuat. Tegap namun tetap ramah, ia mengatur ibu-ibu itu, meminta mereka duduk rapi berjajar dan tetap tenang menunggu giliran dipanggil. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengeluh.

Nasi Hangus pun Tak Disadarinya

"Saya sudah jadi kader Posyandu sejak 1989 sampai 2014," kata Mama Emi ketika menceritakan keterlibatannya dalam program

kesehatan masyarakat. Selama menjadi kader Posyandu itu, Mama Emi sudah akrab menggeluti beragam masalah kesehatan dan gizi anak, dan terlibat aktif dalam beragam upaya mensosialisasikan perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Tahun 2014 ketika berhenti menjadi kader Posyandu di Bibida, ia kemudian menjadi kader pelayanan kesehatan anak dan ibu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paniai. Perannya tidak jauh-jauh dari mempromosikan kesehatan dan gizi anak serta ibu. Selama tiga tahun ia menjalani peran itu dengan senang hati, sambil sesekali masih tetap membantu Posyandu di Bibida, kampungkelahirannya.

Ketika program BANGGA Papua mulai dilaksanakan di Paniai, Mama Emi kemudian diajak untuk ikut bergabung. Pengalaman panjangnya sebagai kader Posyandu dan perannya sebagai salah satu tokoh perempuan yang dihormati di kampungnya, adalah bekal paling pas untuk menjadi anggota Sekber BANGGA Papua, yang di akhir tahun 2017 baru mulai dibentuk. Di program ini, menurut Mama Emi, ia mendapatkan banyak pengalaman baru yang melengkapi pengalaman panjangnya sebagai tenaga kesehatan sukarela.

“Dari dulu saya terbiasa sosialisasi soal gizi dan kesehatan anak, tapi sekarang pengalaman saya bertambah,” ujarnya. Mama Emi adalah salah satu peserta *Training of Trainer* Komunikasi Persuasif yang difasilitasi BaKTI di Paniai pada bulan April 2018. Tepatnya 23-26 April 2018 di Enarotali.

“Pelatihan itu sangat membantu meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan sosialisasi. Terutama dalam melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada calon penerima manfaat BANGGA Papua. Saya jadi tambah tahu bagaimana cara melakukan sosialisasi yang baik,” sambungnya. Sosialisasi yang baik yang dimaksud Mama Emi adalah sosialisasi dengan pendekatan persuasif dan dua arah.

“Saya mempraktikkan semua ilmu yang saya dapat dari pelatihan, kapan saja dan di mana saja. Bukan hanya ketika Sekber Paniai melakukan kegiatan sosialisasi,” ceritanya. Warga calon penerima manfaat di kampungnya menjadi target utama. Apalagi, masyarakat sudah sejak lama mengenal Mama Emi sebagai tenaga kesehatan sukarela dan salah satu tokoh terpandang di kampungnya.

“Saya selalu bilang ke mereka, anak-anak itu harus dikasih cukup gizinya supaya jadi anak pintar, anak cerdas,” kata Mama Emi menirukan pesan yang kerap disampaikannya kepada ibu-ibu di kampungnya.

Pesan itu selalu diulangnya, utamanya ketika ada kesempatan berbicara dengan sekumpulan ibu-ibu di kampungnya. Pesan untuk menjaga kesehatan anak dan meningkatkan gizi mereka, serta menjauhkan anak dari makanan instan yang tidak sehat. Pesan yang karena diulang terus menerus, sampai tertanam di kepala ibu-ibu itu, dan masuk ke alam bawah sadar mereka.

Ketika BaKTI menanyakan kepada beberapa ibu dari Distrik Bibida yang saat itu sedang antri menerima pembayaran dana, apakah mereka sudah paham tentang bagaimana menggunakan dana BANGGA Papua yang disediakan, mereka menjawab dengan benar. “Siapa yang kasih tahu?” tanya BaKTI lagi. “Mama Emi,” jawab mereka.

“Sekarang ibu-ibu sudah tidak mau lagi kasih makan anak-anak itu mi bungkus-bungkus sama itu minuman energi,” kata Mama Emi. Mi bungkus yang ia maksud adalah mi instan yang sebelumnya memang kerap dihidangkan orang tua untuk anak-anaknya.

Sebagai gantinya, menurut Mama Emi, ibu-ibu itu sudah rajin menghidangkan makanan bergizi seperti daging ayam, telur, ikan dan udang. Padahal menurut Mama Emi lagi, orang Moni itu tidak terlalu suka udang. Bibida yang jadi kampung Mama Emi memang didominasi warga

dari suku Moni, salah satu suku mayoritas di Paniai, selain suku Mee.

Saking getolnya melakukan sosialisasi, ada kejadian lucu yang dialami Mama Emi. Saat itu rumahnya kedatangan sekelompok ibu-ibu. Karena sosialisasi seperti sudah mendarah daging dalam dirinya, Mama Emi dengan penuh semangat mulai menjalankan perannya. Dari sosialisasi perihal program BANGGA Papua sampai bagaimana seharusnya ibu-ibu menjamin gizi anak-anaknya agar selalu baik. Saking semangatnya, ia sampai lupa kalau sedang menanak nasi. “Sa pu nasi itu sampai hangus, hahaha,” katanya sambil tertawa geli mengingat kejadian itu.

Kandang Ayam untuk Gizi Anak

Tidak hanya berhenti di edukasi tentang makanan bergizi, Mama Emi bahkan mendorong keluarga di kampungnya untuk beternak ayam. Tujuannya agar mereka tidak perlu repot membeli telur dan daging ayam, tapi bisa langsung menikmati hasil ternak mereka sendiri.

Kebiasaan beternak ayam pernah menjadi kebiasaan orang di Bibida, tapi itu dulu. Suatu waktu, mereka meninggalkan kebiasaan itu. Barulah ketika Mama Emi aktif mendorongnya kembali, mereka mulai lagi melakukan kebiasaan lama itu. Satu per satu kandang ayam hadir kembali di kampung mereka, lengkap dengan ayam-ayam yang diharapkan bisa jadi pemasok protein bagi mereka dan anak-anak mereka.

“Saya bilang, itu bapak-bapak kalau mau minta uang sama istrinya, harus bangun kandang ayam dulu. Jadi sekarang mereka rajin sekali bikin kandang ayam, hahaha!” ujar Mama Emi sambil tertawa.

Keberhasilannya mendorong warga untuk membuat kandang ayam adalah satu dari sekian banyak kerja keras Mama Emi sebagai anggota Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai. Ia juga sangat aktif membantu pendaftaran dan pendataan calon penerima manfaat. Dalam setiap kesempatan mensosialisasikan program BANGGA Papua, Mama Emi juga selalu berusaha mendata calon penerima manfaat. Utamanya mereka yang baru memiliki anak.

Ketika ditanya kenapa ingin menjadi anggota Sekber, Mama Emi menjawab kalau ia memang sangat peduli pada kesehatan anak. “Saya itu mau anak-anak Papua sehat dan cerdas,” kata Mama Emi.

Nelly Magai, anak ketiganya yang juga menjadi anggota Sekber Paniai. Dia menceritakan, ibunya rajin sekali membawa anak-anaknya imunisasi, bahkan sampai ke Enaro, yang jaraknya jauh dari



Foto : Syarifullah /Yayasan BaKTI

Mama Emi mengatur ibu-ibu dari Distrik Bibida yang sedang antri menerima pembayaran dana BANGGA Papua. Sosialisasi yang dilakukan mama Emi telah membuat mereka paham tentang bagaimana menggunakan dana tersebut.

kampung tempat tinggal mereka. Menurut Nelly, ibunya punya prinsip, “Pokoknya anak-anaknya harus sehat.”

Saat BaKTI menyelenggarakan pelatihan komunikasi tingkat lanjut untuk Program BANGGA Papua, Mama Emi kembali menjadi peserta pelatihan komunikasi tingkat lanjut, yang difasilitasi BaKTI pada bulan Oktober 2018 di Enarotali, Paniai. Dalam pelatihan itu, Mama Emi dan peserta lainnya berlatih mengantisipasi

keluhan-keluhan dari penerima manfaat, saat pembayaran dana dilakukan.

Menurut Nelly, ibunya itu giat sekali mensosialisasikan BANGGA Papua. Ia cerita, seringkali ada masyarakat dari kampung lain yang menginap di tempat tinggalnya di Bibida. “Kalau sudah begitu, mama pasti menggunakan kesempatan untuk sosialisasi tentang BANGGA Papua.”

BANGGA Papua adalah program yang diinisiasi oleh Pemprov Papua yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak orang asli Papua, dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus). Melalui BANGGA Papua, Pemprov Papua sedang membangun generasi emas Papua. BANGGA Papua menyediakan dana bagi anak orang asli Papua yang berusia di bawah 4 tahun, untuk digunakan membeli atau menyediakan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Dana diberikan langsung kepada ibu dan ditransfer melalui rekening miliknya. BaKTI menerima mandat untuk mendukung komunikasi strategis BANGGA Papua, khususnya meningkatkan kapasitas komunikasi pelaksana program di provinsi dan kabupaten.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Program BANGGA Papua, dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Reses Partisipatif

Mengefektifkan Fungsi Anggota DPRD

Oleh **IBRAHIM FATTAH**

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat pada tingkat Kabupaten dan Kota.



Anggota Parlemen Perempuan Kabupaten Maros, Hj. Haeriah Rahman sedang memberikan penjelasan kepada kelompok masyarakat yang berkumpul dalam kegiatan reses. Masa reses adalah waktu anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.
Foto: Ismawati/Yayasan BaKTI



Foto : Rahmat/Yayasan BaKTI

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota/Bupati. Adapun fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, APBD, pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

Masa reses adalah masa di mana anggota DPR/DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masa reses adalah waktu anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR/DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Reses sangat efektif digunakan dalam rangka menjalankan ketiga fungsi tadi. Reses dapat menjadi instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen, serta untuk

melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.

Di sisi lain, reses juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPR/DPRD, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan, melalui mekanisme yang telah ditentukan. Reses adalah salah satu mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam sebuah reses akan memberi hasil yang lebih aktual dan berbasis fakta sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses.

BaKTI melalui Program MAMPU memperkenalkan sebuah metode reses yang disebut Reses Partisipatif. Reses Partisipatif adalah metode reses yang partisipatif dan berperspektif gender. Dalam Reses Partisipatif, penting untuk memastikan peserta mewakili sebanyak-banyaknya unsur dalam masyarakat, dilaksanakan di tempat yang nyaman dan suasana yang tidak formal.



Foto : Ismawati/Yayasan BaKTI



Foto : Siju Moreira/Yayasan BaKTI

Penggunaan istilah 'partisipatif' pada Reses Partisipatif merujuk pada metode, peserta, dan tempat. Dengan demikian, Reses Partisipatif menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*Focus Group Discussion*, FGD). Peserta yang hadir dalam reses mewakili berbagai unsur di masyarakat dan menjadi subyek kegiatan. Adapun 'perspektif gender' dalam Reses Partisipatif merujuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perspektif gender dalam sebuah diskusi adalah penting, terutama dalam menempatkan peserta reses pada posisi setara: perempuan, laki-laki, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan sebagainya.

Sebagai sebuah metode reses, Reses Partisipatif mempunyai perangkat yang mudah diterapkan. Metode ini dapat dipelajari oleh siapa pun secara cepat dan mudah dalam penerapan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan antara lain adalah jumlah peserta dan keterwakilan seluruh unsur masyarakat orang, fasilitator haruslah orang-orang mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai pendidikan kritis, pendidikan orang

dewasa, kesetaraan gender, hak asasi perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, dan hak asasi manusia.

Syarat minimum tersebut penting karena Reses Partisipatif menghadirkan konstituen dari berbagai elemen masyarakat yang sangat heterogen. Fasilitator tidak sekadar mengatur lalulintas pembicaraan, tetapi juga menempatkan diri sebagai orang memiliki pemihakan terhadap peserta yang berada pada posisi tidak berdaya ketika berhadapan dengan peserta yang mendominasi. Karena status sosial dan pengetahuan, biasanya peserta tertentu mendominasi dan menguasai forum reses. Metode dalam Reses Partisipatif tidak memberi peluang terjadinya dominasi oleh peserta tertentu.

Reses Partisipatif dirancang untuk menjadi suatu sistem yang mendukung kerja-kerja anggota DPRD secara menyeluruh. Hasil Reses Partisipatif dikelola untuk digunakan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Pendokumentasian yang baik merupakan bagian dari Reses Partisipatif. Artinya, dokumentasi merupakan bagian dari Reses Partisipatif sehingga sejak awal dipersiapkan seorang notulen yang akan merekam semua proses reses. Notulen mencatat proses reses dan mengamati dinamika reses yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan reses selanjutnya.

Pada fungsi anggaran, anggota DPRD mendapatkan aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya masalah ekonomi, sosial, infrastruktur dasar dan lain-lain. Masalah-masalah ini dicarikan solusinya secara bersama-sama oleh masyarakat (musyawarah mufakat) sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Agenda ini sangat penting karena anggota DPRD tidak boleh lagi memasukkan usulan kegiatan jika sebelumnya tidak ada dalam RKPD.

Pada fungsi legislasi, anggota DPRD mendapatkan aspirasi tentang masalah-masalah



Foto : Grace/Yayasan PUPA

aktual di masyarakat, misalnya ketertiban umum, gizi buruk, angka kematian ibu dan anak, dan sebagainya, sehingga bisa menjadi usulan reses yang nantinya menjadi informasi penting bagi anggota DPRD untuk selanjutnya diusulkan menjadi aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam Badan Legislasi atau Hak Inisiatif DPRD untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pada tahun berikutnya.

Pada fungsi pengawasan, anggota DPRD bisa mendapat aspirasi tentang masalah-masalah aktual di masyarakat, misalnya pemberian bantuan tidak merata atau diskriminatif, penerima manfaat kegiatan SKPD tidak tepat sasaran, jumlah penerima manfaat kegiatan SKPD lebih sedikit daripada yang dianggarkan atau ada potensi korupsi, dan lain-lain.

Anggota DPRD yang melakukan reses secara teratur dan dengan metode tepat, seperti menggunakan Reses Partisipatif, maka anggota DPRD yang bersangkutan tidak hanya mampu dalam menjalankan fungsinya secara baik dan efektif. Tetapi kinerja anggota DPRD bersangkutan mengalami peningkatan karena memperoleh data dan informasi yang valid dan cukup banyak di lapangan.

Itu karena Reses Partisipatif menempatkan konstituen sebagai subyek dan sumber data dan informasi, yang akan memasok data dan informasi tersebut kepada wakilnya di DPRD. Berbeda dengan reses-reses yang dilaksanakan secara konvensional, dimana konstituen ditempatkan sebagai obyek, dan hanya orang-

orang tertentu yang memberi data dan informasi kepada anggota DPRD ketika melakukan reses.

Hal-hal sensitif, seperti diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu, pemotongan anggaran, bantuan yang salah sasaran, pengerjaan bangunan fisik tidak sesuai dengan rencana, dan sebagainya, tidak pernah akan muncul pada reses-reses yang dilaksanakan secara konvensional. Itu karena pelaku-pelakunya selalu menjadi peserta reses, sedangkan korban-korbannya yang terdiri dari warga miskin, perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal tidak pernah diundang untuk menjadi peserta reses.

Reses Partisipatif menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif untuk pengawasan. Warga yang selalu menjadi korban dapat diberi kesempatan dan peluang untuk menyampaikan aspirasinya. Di samping itu, pelibatan warga dari berbagai unsur dapat mencegah pihak-pihak yang selama ini menjadi pelaku-pelaku yang melakukan berbagai tindakan yang merugikan warga miskin dan marjinal.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Direktur Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Program MAMPU - BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Asmanak dan Ume Bubu

Oleh **JOANIVITA PAULO GULO SORU**

Laughter is brighter in the place where the food is
Tertawa yang paling riang ada di tempat di mana ada makanan

Sebuah peribahasa dari Irlandia di atas inilah yang terngiang di kepala ketika saya memasuki Ume Bubu (Rumah Bulat), dapur sekaligus lumbung di rumah warga Kelurahan Lelogama Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang.



Foto : Ketut Wentan/threadsolife

Akankah generasi milenial tetap menjaga tradisi ini? Atau mereka memilih mempertahankan Ume Bubu atau memilih dapur mewah dengan perabot mahal?

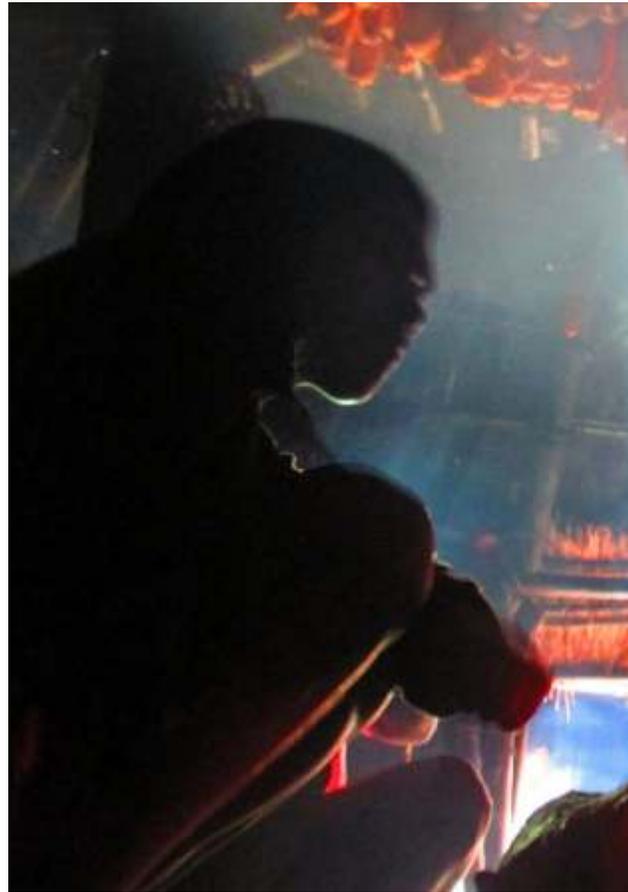
Seakan bertolak belakang dengan peribahasa dari negeri seberang tersebut, saya malah bercucuran air mata ketika berada di dalam bangunan tradisional orang Timor tersebut yang terbuat dari daun ilalang sebagai ciri khasnya. Bagaimana tidak, saya harus menunduk berjongkok bahkan nyaris merayap untuk masuk ke dalam bangunan multifungsi itu namun disambut dengan asap tebal yang mengepul dari tungku batu di titik tengah ruangan. Sungguh menyiksa mata, hidung dan tenggorokan saya yang tidak terbiasa dengan kondisi itu. Rasa asapnya begitu mem bakar saluran napas dan mata saya.

Meskipun demikian, saya terpukau luar biasa ketika mendongakkan kepala ke bagian atas tungku. Deretan jagung berkulit yang diikat dan disusun berbaris tepat di atas tungku tersebut. Ada pula kantong-kantong anyaman daun lontar yang bergelantungan di antara barisan jagung. Isinya biji-bijian dan kacang-kacangan sebagai bibit untuk musim tanam berikutnya. Namun, ada seikat jagung berkulit hitam yang begitu kontras dengan warna jagung lainnya. Ia tidak rusak. Ia tidak bernoda. Ia bukan varietas ajaib. Ia adalah Pen Asmanak (pen, jagung dan asmanak, jiwa), "jiwa" yang menjaga lambung.

Jagung yang dipercaya warga harus tetap tinggal di dalam Ume Bubu sampai musim panen tiba kemudian akan diganti dengan Pen Asmanak yang baru. Jagung yang dipercaya warga sebagai simbol untuk menjaga agar lambung tetap terisi.

Bagi saya, Asmanak dan Ume Bubu bukan hanya tradisi menjaga hasil panen saja tetapi lebih dari itu. Asmanak telah menjadi contoh nyata usaha menyediakan pangan yang berkelanjutan dan Ume Bubu sebagai wujud upaya nyata untuk mempertahankan dan mendaftarkan pangan dalam lingkup keluarga. Tetapi, Asmanak dan Ume Bubu bersifat tradisional.

Pertanyaan muncul di kepala saya dan mengorek saya untuk terus bertanya.



Sampai kapan tradisi ini bertahan seiring dengan kemajuan teknologi? Sampai kapan mereka bertahan menjaga perut warga Lelogama dari kebutuhan pangan? Sampai kapan mereka melindungi hasil panen petani Lelogama?

Sebelumnya, saya merasa bangga karena menjadi penerima beasiswa KEJAR PALOK (Ketong Belajar Keberagaman Pangan dan Pangan Lokal) yang diselenggarakan Perkumpulan Pikul bekerja sama dengan OXFAM dan Australian Aid. Lembaga non-profit ini sedang fokus pada isu *Food Diversity and Sovereignty*. Saya dan teman saya, Atta Loban, harus *bolang* (istilah untuk jalan-jalan sambil berpetualang) di Lelogama selama 7 hari.

Program ini merangkul generasi milenial untuk belajar tentang kedaulatan dan ketahanan pangan, serta keberagaman pangan dan pangan lokal sebagai solusi untuk kedaulatan pangan. Ini tidak hanya kesempatan emas. Tetapi bertabur berlian dan permata. Mengapa? Saya adalah bagian generasi milenial yang menjadi jembatan antara generasi orang tua yang terlambat mengenal teknologi dengan akses yang lebih mudah seperti internet dan generasi mendatang



Taa'han (memasak) di Ume Bubu (Rumah Bulat) merupakan Rumah Tradisional Orang Timor, NTT. Rumah ini bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, dapur, serta gudang/lumbung penyimpanan bahan makanan serta benih pangan yang akan ditanam pada musim tanam tahun depan. Tungku (batu berpola segitiga) tepat berada ditengah di dalam Ume Bubu. Tempat para Mama menanak nasi, memasak lauk pauk atau hanya sekedar berkumpul menghangatkan badan saat musim hujan tiba. Foto : [Atta Loban/Wikimedia Commons](#)

yang diperkirakan akan lebih fasih teknologi sejak dini. Saya bersyukur dengan peluang ini untuk membuka wawasan dan cakrawala berpikir di bidang pangan. Belajar berpikir kritis bagaimana jika di masa depan, dengan adanya kemajuan teknologi, lantas menggeser tradisi kita terutama dalam bidang pangan?

Warga Lelogama punya keberagaman serealida dan umbi-umbian. Berbekal pengetahuan dan cara pandang ala milenial. Kami masih belajar dan nanti akan menyadarkan orang-orang tentang peran pangan lokal sebagai bagian dari keberagaman pangan untuk kedaulatan pangan.

Kendala terbesar dalam menyadarkan atau mengkampanyekan konsumsi pangan lokal adalah asumsi bahwa nilai pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian masih rendah dibandingkan beras, pengolahan yang lebih rumit, dan kurangnya inovasi pengolahan pangan lokal. Sangat disayangkan.

Hal ini terasa menggelitik ketika saya makan bersama keluarga, tempat saya menginap di Lelogama maupun saat berkunjung ke rumah warga lainnya. Mereka harus merogoh kocek lagi

untuk membeli beras di kios padahal mereka punya Pen Muti, Pen Molo, Pen Buka dan Anel Meto di Ume Bubu. Di meja makan pun, mereka menyediakan dua jenis sumber karbohidrat ini secara berdampingan.

Dengan hati bimbang, saya harus memilih untuk mengambil mana yang duluan, nasi atau jagung katemak (olahan pangan tradisional Timor dari jagung yang direbus bersama dengan sayuran dan atau kacang-kacangan). Lebih menggelitik lagi karena warga menyarankan makan nasi saja dulu baru makan jagung. Betapa mereka menghargai tamu dengan menyodorkan nasi dibanding hasil kebun mereka sendiri.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa warga di Lelogama sudah tidak bergantung pada jagung atau umbi-umbian dari kebun mereka saja. Menurut cerita mama-mama di RT 10 di Kelurahan Lelogama ketika kami masak bersama, sejak masuknya beras sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an, mereka sudah beralih ke beras. Alasannya cukup sederhana. Mereka bisa langsung membeli beras di kios atau pasar dan mengolah beras menjadi nasi lebih mudah

dibandingkan mengolah jagung menjadi Jagung Katemak, Jagung Bose, Sagu, dan atau U Foit. Mereka bisa punya banyak waktu untuk mengerjakan hal-hallainnya.

Bersamaan dengan kisah ini, Saya dan Atta mengajak Mama-Mama di RT 7 dan 10 Kelurahan Lelogama untuk kembali bernostalgia dengan kuliner tempo dulu berbahan dasar pangan lokal yang mereka miliki. Saya berkeinginan untuk mencari tahu pengolahan pangan lokal apa yang sudah jarang sekali dilakukan dan kreasi pangan lokal apa saja yang mereka miliki. Saya ingin agar Asmanak dalam Ume Bubu tetap memberikan inspirasi pengolahan jagung.

Gayung bersambut mama-mama mengambil bahan pangan lokal dari lumbung hidup mereka di kebun atau pun yang disimpan di Ume Bubu. Di RT 07, mereka menunjukkan proses pembuatan U Amuk, kudapan lezat berbungkus daun jagung ini berbahan dasar jagung dan kelapa serta ditambah madu dan bisa awet hingga 1 minggu. U Amuk dulunya biasanya dijadikan bekal ketika pergi berkebon atau ke tempat yang jauh.

Di RT 10, mama-mama kembali membuat olahan jagung dengan proses panjang seperti U Amuk juga. Namanya U Foit. U foit bukan sekedar kudapan tetapi bisa setara dengan sumber karbohidrat utama di piring. Dahulu, sebelum mengenal beras, U foit dikonsumsi khususnya balita atau orang tua yang tidak bisa mengonsumsi jagung katemak atau jagung bose yang teksturnya lebih keras. Mama-mama di RT 10 juga kembali mengenang kreasi pangan lokal berbahan ubi kayu, pisang dan kelapa. Namanya Kokis Akiso Mataf (Kue Kaca Mata) karena bentuknya yang mirip dengan kaca mata. Campuran ubi kayu dan kelapa sebagai bingkainya, dan pisang sebagai kacanya.

Beralih dari kisah hasil panen dalam Ume Bubu, kami menuju kebun mama Marselina Mafefa. Kebun adalah lumbung hidup. Tempat di mana calon-calon Pen Asmanak tumbuh. Tempat di mana peluh tumpah ketika menanam namun tawa lepas ketika panen. Di sinilah saya menemukan contoh keberagaman pangan lokal yang dimiliki warga Lelogama. Ada serealialia berupa pen Muti, pen molo, pen buka, pen botog, toenenel dan anel meto. Dari golongan umbi-umbian ada laku haug, laku loli, lali mael, dan lali metan. Ada pula buah-buahan seperti boko meto, timu dan timu anel. Ini baru 1 kebun. Belum kebun warga lainnya. Menurut Mama Mafefa, musim panen tanaman tersebut tidak bersamaan.

Berpindah dari kisah kebun, kami pun pergi mengunjungi pasar mingguan setiap hari Sabtu. Di

pasar, tidak banyak pangan lokal yang dijual. Banyak jenis makanan dalam kemasan seperti mi instan, gula, terigu dan bahan kebutuhan lainnya yang dijual. Kami pun sedikit kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa tentang pangan lokal. Tapi kemudian kami begitu bahagia ketika bertemu dengan mama Oktaviana Tamoies dari Desa Leloboko Kecamatan Amfoang Tengah yang berjualan Arbila dan koto fael. 2 jenis kacang hutan yang pengolahannya sangat memakan waktu dan boros tenaga. Bagaimana tidak? Kacang tersebut harus direbus 12 kali untuk menghilangkan racun mematakannya.

Kami pun bertemu dengan Mama Naomi Toleu, dari desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah. Mama Naomi menjual satu-satunya pangan lokal sumber protein yang kami temui di pasar Lelogama. Sisi Meto (daging kering), adalah daging sapi yang diiris panjang dan dikeringkan dengan cahaya matahari di musim panas atau asap api di Ume Bubu ketika musim penghujan tiba. Memang, sapi-sapi warga dilepas berkeliaran bebas di padang dan hanya 1 atau 2 ekor yang dipelihara di rumah tetapi tidak setiap hari mereka menyediakan daging sapi di meja.

Setelah ke pasar, kami bertamasya ria di sabana depan pasar. Indah memang di antara rerumputan hijau dan 5 – 10 ekor sapi di puncak bukit. Saya sempat bertanya pada Elen Pahnuel (16 Tahun). Apakah dia pernah mengonsumsi U Amuk dan U Foit? Ternyata jawabannya tidak pernah. Ia juga pertama kali mengonsumsi makanan tempo dulu itu. Saya sangat tersontak kaget karena ini adalah kuliner di daerah mereka. Namun ia baru pertama kali mencobanya.

Saya kembali teringat Kisah Asmanak dan Ume Bubu, akankah generasi milenial tetap menjaga tradisi ini? Atau mereka memilih mempertahankan Ume Bubu atau memilih dapur mewah dengan perabot mahal? Apakah Asmanak akan tetap menjadi jiwa yang menjaga pangan mereka atau akan diganti dengan Asmanak dalam rupa lainnya seiring perkembangan zaman? Entahlah. Jawabannya ada di tangan anak milenial yang memiliki keinginan untuk mendaulatkan pangan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Peserta Magang Program KEJAR PALOK (Ketong Anak Muda Belajar Pangan Lokal), Proyek Keberagaman Pangan untuk Kedaulatan Pangan, PIKUL – OXFAM, Desember 2017 – Februari 2018. Tulisan ini telah dimuat di <https://www.perkumpulanpikul.org/2018/08/20/asmanak-dan-ume-bubu/>



Foto : Syaifullah /Yayasan BaKTI

Menengok RSUD Paniai, Rujukan di Mee Pago

Oleh **SYAIFULLAH**

“

Beberapa bulan lalu saya berkunjung ke RSUD Paniai, salah satu rumah sakit terbaik di pegunungan tengah Papua.

Rumah sakit rujukan di kawasan adat Mee Pago. Ini adalah selayang pandangnya.

Perempuan Itu Menggendong seorang bayi mungil, berdiri malu-malu di depan pintu aula. Perawakannya ramping dengan rambut keriting dan kulit gelap, khas orang Papua. Di gendongannya, si bayi mungil itu tidur dengan lelapnya, terbungkus selimut tebal.

“Saya dari Waghete,” jawabnya ketika saya menyapa dan bertanya asalnya. Sebelumnya dia menyebut namanya, Vince.

Waghete adalah sebuah kota yang berjarak sekira 15-an km dari tempat itu, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Deiyai dan ditempuh dengan taksi (sebutan orang Papua untuk kendaraan umum) selama lebih kurang 30 sampai 45 menit. Vince mengaku sengaja datang dari Waghete ke tempat itu, membawa Jockie, bayi mungilnya yang berumur empat bulan untuk imunisasi.

Tapi, kenapa harus jauh-jauh ke sini? Tanya saya. Apakah di Waghete tidak ada layanan kesehatan untuk ibu dan anak?

“Ada, tapi saya lebih suka di sini,” jawab Vince dengan senyum dan wajah tersipu malu.

“Di sini” yang dimaksud Vince adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paniai.



Foto : Syaifullah /Yayasan BaKTI

Letaknya di kota Madi, sekira 3 km dari Enarotali, ibukota Kabupaten Paniai. Hari itu kebetulan hari Rabu minggu ketiga, hari ketika imunisasi gratis diberikan kepada ibu-ibu warga Paniai dan sekitarnya.

Paniai adalah sebuah kabupaten di kawasan pegunungan tengah Papua bagian barat. Untuk mencapai Paniai, dapat dilalui dengan transportasi darat dari Nabire selama lebih kurang 7 jam perjalanan, meniti bukit dan jalan berkelok yang cukup menguras tenaga. Jalur Nabire-Paniai adalah bagian dari Trans Papua yang diperbaiki di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Imunisasi di RSUD Paniai itu digelar di sebuah ruangan lantai satu rumah sakit itu. Di dalam ruangan, puluhan ibu-ibu dengan bayi mereka duduk tenang menunggu giliran dipanggil. Ada empat petugas kesehatan berbaju putih yang bertugas. Mereka membagi tugas, ada yang bertugas memanggil dan mendata ibu dan bayi, ada yang bertugas menimbang, dan ada yang bertugas menyuntik dan mengimunisasi. Suara tangis bayi bergema dan bersahutan ketika lengan bayi mungil itu tertusuk jarum suntik. Suasana riuh namun tetap terasa sejuk. Maklum, Madi terletak di ketinggian 1.700 Mdpl. Udara sejuk terasa hampir sepanjang hari.

“Rumah Sakit Ini berdiri sejak 2005, tapi operasional baru ada sejak tahun 2007,” kata Dr. Agus, direktur RSUD Paniai yang menjabat

sejak 2013. Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi orang keempat yang menjabat sebagai direktur RSUD Paniai. Dia datang bertugas di Paniai sejak tahun 2007.

Keberadaan RSUD Paniai ini diakui secara resmi melalui Surat Keputusan Bupati No.10 tahun 2006, tertanggal 8 Mei 2006. Surat keputusan ini menetapkan RSUD Paniai sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemda Paniai.

Saat ini statusnya memang masih berstatus D, namun RSUD Paniai sudah diakui sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah adat Mee Pago, melayani empat kabupaten yaitu; Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya. Keempat kabupaten tersebut secara geografis memang berdekatan. Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana adalah alasan utama yang menjadikan RSUD Paniai sebagai rujukan untuk keempat kabupaten tersebut.

“Kita punya dua spesialis penyakit dalam, dua spesialis bedah, dua spesialis obgyn, satu spesialis anak, satu patologi klinik dan satu spesialis anestesi. Untuk tenaga memang sudah mencukupi, sementara untuk sarana dan pra sarana kita punya 130 *bed* dan dengan adanya bangunan-bangunan baru ini rencananya nanti kita genapkan jadi 150 *bed*,” kata Dr. Agus. Di dalam kompleks rumah sakit itu memang sedang ada pembangunan, beberapa bangunan baru nampak masih dikerjakan oleh tukang.

Keberadaan RSUD Paniai sudah cukup menjadi oase di tengah keringnya pelayanan kesehatan di pegunungan tengah Papua bagian Barat.

Untuk sebuah rumah sakit berakreditasi D, menurut Dr. Agus ketersediaan tenaga dan sarana itu sudah mencukupi. Desember 2017, RSUD Paniai mendapatkan sertifikat akreditasi rumah sakit yang menyatakan RSUD Paniai lulus tingkat dasar atau perdana.

Kelengkapan tenaga dan sarana itu pula yang membuat warga di empat kabupaten wilayah adat Mee Pago memilih RSUD Paniai sebagai tujuan utama mereka untuk berobat. Sebenarnya bukan hanya di keempat kabupaten di pegunungan tengah bagian barat itu saja, warga dari Nabire pun ada yang lebih memilih untuk berobat ke RSUD Paniai. Padahal, Nabire termasuk kota yang cukup maju karena berada di daerah pesisir.

“Keluarga saya yang di Nabire ada yang pernah sampai berobat ke RSUD Paniai,” kata Fince Gobay, perempuan muda yang sehari-harinya bertugas di dinas kesehatan Kabupaten Paniai. “Waktu itu dia usus buntu, karena penanganan di Nabire lambat dia memilih ke RSUD Paniai. Akhirnya operasi di Paniai dan bisa sembuh dengan cepat,” sambungnya.

Cerita Fince Gobay ini seakan menguatkan posisi RSUD Paniai sebagai rumah sakit rujukan di wilayah adat Mee Pago.

“Masalah Kesehatan Yang Paling Utama di sini masih soal Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” kata Ningsih, salah satu perawat di RSUD Paniai.

Ningsih masih muda, usianya tak kurang dari 20 tahun. Pagi itu dia baru saja selesai membantu urusan administrasi di depan salah satu poliklinik. Ada belasan orang di sana, sebagian mereka berkumpul di berdesakan di depan loket pendaftaran. Seorang pria Papua berpakaian putih-putih mencoba mengatur mereka. Ucapan-ucapan dalam bahasa daerah terlontar dari bibirnya, entah apa yang diucapkannya. Mungkin meminta agar orang-orang tersebut mengantri dengan lebih rapi.

Ningsih menceritakan, sebagian besar pasien yang datang berobat memang karena kasus ISPA.

Penyakit yang disebabkan oleh virus di udara ini memang gampang sekali menular di lingkungan yang tidak bersih, salah satu masalah kesehatan yang kerap ditemui di Paniai.

RSUD Paniai

“Sebenarnya kalau di Paniai itu masalah gizi tidak terlalu besar, yang besar itu masalah kebersihan. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih itu yang masih kurang,” kata Fince Gobay ketika kami temui di Nabire. Fince yang juga pegawai Dinas Kesehatan Kab. Paniai itu punya banyak pengalaman dan pengetahuan bila berbicara tentang masalah kesehatan di Paniai. Kondisi tidak higienis itu pula yang diduga menjadi penyebab maraknya virus ISPA.

Selain ISPA, penyakit lain yang juga banyak diderita oleh pasien RSUD Paniai adalah diare dan malaria. Menurut Dr. Agus, khusus untuk kasus malaria ini kasusnya memang semakin meningkat ketika akses ke Paniai semakin terbuka.

Masalah kesehatan yang mendasar masih terus menjadi hambatan, bahkan perilaku hidup sehat pun belum tentu sepenuhnya dimengerti warga. Meski begitu, tantangan tersebut menurut Dr. Agus tidak membuat dia dan semua personil tenaga kesehatan di Paniai menyerah.

Sejauh ini, keberadaan RSUD Paniai sudah cukup menjadi oase di tengah keringnya pelayanan kesehatan di pegunungan tengah Papua bagian barat. Kondisi alam yang berat dan sarana yang tidak lengkap terkadang menjadi alasan kurang tersedianya tenaga kesehatan yang memadai. Beruntung karena RSUD Paniai bisa menyediakan itu semua, menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan di wilayah adat Mee Pago untuk saat ini.

“Harapan kami ke depan, tipe rumah sakit bisa meningkat dari D ke C. Semoga alat-alat yang dibutuhkan untuk naik ke akreditasi C bisa kami penuhi, karena tenaga yang sudah ada menurut kami sudah mumpuni. Mudah-mudahan saja dengan dukungan Pemda, masyarakat dan pihak terkait bisa mendukung kami. Mudah-mudahan juga kami bisa menjadi rumah sakit satelit untuk Kabupaten Dogiyai dan Deiyai.” pungkas Dr. Agus ketika ditanya tentang harapannya terhadap RSUD Paniai.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email ipul.ji@gmail.com

Menggalang Komitmen untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender

Oleh **LUSIA PALULUNGAN**



Dalam pengalaman pendampingan BaKTI, pembuatan dan implementasi peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh komitmen dan posisi masing-masing pihak dalam kelembagaan.

Perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender makin terbuka, meluas, dan masif. Berdasarkan pengalaman Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yang dilaksanakan BaKTI, ada 3 hal yang menjadi faktor pendorong dan penentu yaitu kebijakan, komitmen pelaku pembangunan, dan sinergi/kolaborasi *stakeholders* pembangunan.

Pertama, adanya kebijakan nasional dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan lainnya, baik di level nasional maupun daerah menjadi salah faktor pendorong. *Kedua*, kebijakan ini kemudian ditanggapi dan dikelola oleh para *stakeholders* pembangunan sebagai komitmen, peran, tanggung jawab, dan tugas pokok/fungsi untuk direalisasikan dan diimplementasikan secara riil. *Ketiga*, selain didorong oleh kebijakan dan komitmen, faktor penentu lainnya adalah kolaborasi strategis para *stakeholders* juga sangat menentukan untuk realisasi, implementasi dan kemanfaatannya bagi masyarakat termasuk kelompok rentan dan marjinal.

Prinsip Good Governance

Ketiga hal tersebut, saling terkait satu sama lain dan akan sangat efektif kemanfaatannya jika dilakukan secara strategis dengan prinsip pemerintahan yang baik. Menurut UNDP, prinsip

good governance atau pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Partisipasi yaitu peran serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan juga kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Aturan hukum yaitu hukum harus adil, tanpa perbedaan, ditegakkan dan dipatuhi, terutama tentang HAM (Hak Asasi Manusia).
3. Transparan yaitu adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga sehingga gampang diketahui oleh masyarakat.
4. Daya tanggap yaitu proses yang dilakukan oleh setiap lembaga harus diarahkan ke upaya untuk melayani pihak yang membutuhkan.
5. Berorientasi konsensus yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama.
6. Berkeadilan yaitu memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
8. Akuntabilitas yaitu pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati.
9. Bervisi strategis yaitu pemimpin dan masyarakat punya usaha yang luas dan berjangka panjang dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan cara memahami berbagai aspek yang ada dalam kehidupan rakyat.
10. Saling terkait, yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pengalaman BaKTI mendampingi APP/APL (Anggota Parlemen Perempuan/Laki-laki), DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), media dan LSM Lokal (YLP2EM) di Kota Parepare dan Kabupaten Maros sebagai *stakeholders* kunci dalam pembangunan menunjukkan hasil yang menggembirakan yang berujung pada terwujudnya pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan/marjinal.

Di Kota Parepare telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare No. 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan

(Kiri) Suasana kegiatan reses partisipatif yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Kota Parepare.

(Kanan) Proses Pembahasan Draft RaPerda. Sejumlah Perda yang telah ditetapkan, diusulkan oleh pemerintah daerah khususnya DPPPDA dan juga oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), oleh komisi terkait yang diinisiasi oleh APP/APL, yang telah memiliki komitmen/perspektif tentang isu gender, perempuan, anak, disabilitas, kemiskinan dan isu sosial lainnya.



Foto : Rahmat /Yayasan BaKTI

Perempuan dan Anak. Sedangkan di Kabupaten Maros telah ditetapkan Perda Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak di Kota Maros, dan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.

Sejumlah Perda yang telah ditetapkan di kedua daerah tersebut, diusulkan oleh pemerintah daerah khususnya DPPPDA dan juga oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), oleh komisi terkait yang diinisiasi oleh APP/APL, yang telah memiliki komitmen/perspektif tentang isu gender, perempuan, anak, disabilitas, kemiskinan dan isu sosial lainnya.

Partisipasi masyarakat untuk dapat menyuarkan berbagai isu dan kepentingan, diorganisir oleh LSM yang telah melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan sehingga masyarakat khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan/marginal dapat menyatakan eksistensinya. Kerja kolaborasi ini kemudian diwacanakan oleh media melalui pemberitaan positif, sebagai fungsi edukasi masyarakat dan untuk mengikat komitmen *stakeholders* pembangunan, agar kebijakan dapat ditetapkan, termasuk mengawal implementasi kebijakan tersebut.

Kerja kolaborasi dan strategi tersebut, dijabarkan lagi oleh DPPPDA dan DPRD melalui program dan kegiatan yang dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota. Di Parepare, perlindungan perempuan dan anak melalui pemenuhan hak dan

akses terhadap layanan kesehatan kemudian menjadi lebih responsif. Salah satunya adalah layanan kesehatan melalui *Call Center* Pelayanan Kesehatan 112 (mobil ambulans 15 menit sampai di tempat tujuan), yang menjangkau pelayanan sampai ke rumah masyarakat. Dimana awalnya layanannya bersifat umum. Namun dengan adanya aspirasi masyarakat yang menyuarkan bahwa perlunya layanan bagi ibu hamil dan anak-anak, maka ketika ada permintaan layanan maka dokter kandungan juga disertakan dalam layanan tersebut. Begitu pula peralatan bantuan pernapasan, yang sebelumnya hanya berupa peralatan untuk orang dewasa, kini juga telah disediakan peralatan bantuan pernapasan bagi anak-anak.

Demikian pula di Maros, dimana aspirasi masyarakat yang menyuarkan kesulitan orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar, yang mensyaratkan lulusan TK (Taman Kanak-Kanak). Maka APP/APL kemudian mengusulkan pengaturan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Holistik Integratif (HI) di setiap desa, dimana pengadaan PAUD ini dapat mengatasi kesulitan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke TK karena jauh maupun karena kesulitan biaya. Sehingga PAUD Holistik Integratif selain menyelesaikan masalah kesulitan akses pendidikan di TK juga menyelesaikan permasalahan kesehatan dan sosial lainnya, karena di PAUD HI, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan anak balita dan ibunya.



He for She – They for All

Dalam pengalaman pendampingan BaKTI, pembuatan dan implementasi peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh komitmen dan posisi masing-masing pihak dalam kelembagaan. Namun kebijakan yang responsif gender dan *pro poor* dapat diwujudkan sampai dipastikan masyarakat dan kelompok marginal/rentan/miskin dapat merasakan manfaatnya jika disertai dengan program dan kegiatan yang anggarannya teralokasi di dalam APBD. Untuk sampai di situ, maka penyusunan program dan kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak serta merta dapat mendukung hal tersebut jika tidak dibarengi dengan komitmen dan kapasitas anggota parlemen untuk memahami program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. Sehingga dalam proses pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di legislatif, dapat diperjuangkan dan disetujui oleh DPRD.

Sedangkan usulan SKPD juga didasarkan pada keaktifan masyarakat khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam proses perencanaan dari tingkat bawah melalui musyawarah tingkat dusun/desa maupun kelurahan. Pada sisi lain, APP/APL yang memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai konstituen tentu saja mengetahui dengan baik kebutuhan masyarakat untuk mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi di lapangan. Selain itu keaktifan masyarakat sebagai konstituen dalam menghadiri Reses anggota DPRD memegang

peranan penting untuk menyuarakan kebutuhan berdasarkan permasalahannya.

Berbagai *stakeholders* pembangunan yang terlibat dan berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender bukan hanya dilakukan oleh perempuan, namun juga dilakukan oleh laki-laki dalam posisi dan kapasitasnya sebagai kepala dinas, anggota parlemen, jurnalis, pimpinan/staf LSM dan individu lainnya yang memiliki komitmen dan perspektif gender/inklusif. Sehingga kolaborasi ini bukan hanya perempuan untuk perempuan sebagaimana mandat utama keterwakilan perempuan (*SHE For SHE*) tapi juga dilakukan oleh laki-laki (*HE For SHE*) bahkan perempuan dan laki-laki (*THEY For ALL*).

Olehnya itu dibutuhkan komitmen, perspektif dan sinergi yang baik diantara *stakeholders* pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan (peraturan dan anggaran) yang disusun secara partisipatif dan diimplementasikan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak masyarakat sipil dapat dipenuhi oleh negara sebagai pemegang mandat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Program MAMPU - BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Mendunia dengan Komik Melawan Perundungan

Oleh **MUGNIAR MARAKARMA**



“Saya lebih nyaman *speak up* lewat gambar. Kalau berhadapan langsung dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak dekat, sulit sekali ngomong. Dengan gambar saya merasa lebih bebas berespresi,”

Rizka Raisa Fatimah Ramli (Pemenang Kontes Komik Global UNICEF)

Saya menyempatkan diri hadir pada Kelas *Sharing* Perpustakaan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia). Kalahkan Kekerasan dengan Komik! adalah topik *sharing* kali ini.

Narasumber kali ini menarik, Rizka namanya. Ia adalah pelajar sekolah menengah yang memenangkan kontes komik yang diselenggarakan oleh Unicef dalam rangka kampanye global #ENDViolence untuk membantu mengeliminasi tindak kekerasan yang dialami anak-anak dan remaja.

"Unicef mengadakan kontes ini tanpa syarat dan ketentuan yang spesifik, namun tema yang ditentukan adalah anti- *bullying* dan *stop violence* terhadap anak-anak baik di lingkungan sekolah atau tempat tinggalnya," ujar Humas Unicef, Kinanti Pinta Karana saat dihubungi Kompas.com pada Senin (14/1/2019)[1].

Kontes komik ini memiliki tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun ini Unicef mengangkat tema tentang kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang akrab disebut *bullying*. Saya pribadi melihat *bullying* ini topik serius untuk ditindaki, bukan hanya jadi bahan



Foto : Unicef.org

diskusi. Dua anak pertama saya pernah mengalaminya. Anak ketiga saya, si spesial yang *speech delay* kalau keluar rumah juga rentan diolok-olok anak-anak lain karena cara bicaranya yang tak biasa.

Zaman *now*, ketika kebanyakan anak memegang HP, *bullying* mudah saja mereka lakukan. Ada yang menggunakan istilah *prank* dan bagi mereka *prank* itu hanya main-main. Ada yang dilakukan di dunia maya, melalui grup-grup media sosial, jalur pribadi, ataupun melalui pesan *Whatsapp* dan masih banyak yang dilakukan di dunia nyata.

Di dunia nyata pun beragam bentuknya. Mulai dari yang secara ekstrem menyerang si anak, ada yang mengolok-olok pekerjaan atau nama orang tua si anak, ada yang dengan mendiamkan anak yang sedang berbicara dengannya, dan sebagainya. Pokoknya perbendaharaan tindakan perundungan ini makin banyak saja.

Itulah yang membuat saya menghadiri acara di kantor BaKTI kali ini. Sayangnya saya datang terlambat. Bersyukur saya masih bisa menyimak Rizka menceritakan pengalamannya mengikuti

kontes. Katanya dia sempat tak berharap menang karena khawatir akan menyita waktunya dalam mempersiapkan diri menyongsong Ujian Nasional SMA dan seleksi masuk perguruan tinggi. Sudah terbayang saja kesibukan yang akan dijalannya jika terpilih sebagai pemenang.

Pemenang kontes ini nantinya akan berkolaborasi dengan tim profesional yang ditunjuk oleh Unicef untuk berkolaborasi membuat buku komik. Buku komiknya nanti akan dipamerkan di hadapan para pemimpin dunia pada sebuah forum politik tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan di markas besar PBB di New York pada bulan Juli 2019 serta didistribusikan kepada sekolah-sekolah dan anak-anak di seluruh dunia.

Sempat pula berpikir ingin mundur ketika finalis asal India menyatakan mundur. Namun Rizka mengkhawatirkan para *voter* yang telah memilihnya. Rasa tak ingin menang terus mengemuka namun kalah telak dengan takdir yang tertulis atas namanya. Rizka berhasil mengalahkan lebih 3.600 karya dari sekira 130 negara di dunia.



Tak hanya itu, Rizka juga mengungguli 9 finalis lainnya dengan mendulang 23 ribu voting. Para finalis yang lain berasal dari Ekuador, Mesir, Yunani, Amerika Serikat, dan Filipina. Menariknya, usia para finalis ini berbeda-beda. “Yang paling tua 25 tahun, yang paling muda 12 tahun,” ujar Rizka.

Namun demikian karakter anak juga memengaruhi. Saya beruntung, Athifah anak yang *talkative* dan mempunyai kemampuan verbal yang baik jadi dia mampu dan mau terbuka kepada saya. Berbeda dengan si sulung Affiq yang lebih tertutup dan tidak banyak bicara.

Pada kasus Affiq saat dia duduk di bangku SMP dulu, beruntung ada kawan baiknya yang menceritakan *bullying* yang dihadapi Affiq kepada papanya sehingga si papa bisa secepatnya menyampaikan kepada guru BK dan kasus *bullying* itu langsung diproses.

Jangan tanyakan perasaan ibu yang anaknya dibully. Sakit, Mak! Jauh lebih sakit ketimbang menghadapi permasalahannya sendiri! Namun demikian, sebagai ibu saya sadar harus bersikap waras dan menjadi pendamping terbaik bagi anak. Teman-teman yang saya menganjurkan agar menguatkan anak saya, itu yang paling utama. Kalau sayanya tidak waras tentu tak bisa

melakukannya. Bersyukur Athifah bisa diajak berdiskusi banyak hal dan mau menerima pandangan-pandangan yang diberikan kepadanya.

Rizka punya pandangan sendiri dalam menghadapi perundungan. Dari penjelasannya, saya menangkap dia lebih memilih menyelesaikan sendiri masalahnya, yaitu dengan menggambar. Namun dia tahu pentingnya untuk *speak up* dan tidak membiarkan perundungan berlarut-larut. *Speak up*-nya “yang dilakukan” Rizka bisa melalui karya.

Kalau boleh saya bahasakan, pelajaran pentingnya diskusi ini adalah bagi yang punya keterampilan menggambar, ayo menggambarlah. Bagi yang punya keterampilan menulis, ayo menulislah. Tapi kalau kalian bisa menceritakan masalah yang terjadi kepada orang tua atau orang dewasa yang bisa dipercaya, lakukanlah. Perundungan memang tak bisa dibiarkan karena pembiaran akan membuat pelakunya memiliki alasan untuk mengulangi perbuatannya lagi dan lagi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email : mugniarmarakarma@gmail.com

Srikandi-Srikandi Pendidikan dari Bea Nanga

Oleh **MAKHRUS YUSAK**

Lelah perjalanan selama sekitar tiga jam melewati jalan bebatuan terjal yang naik turun membelah pegunungan, melewati lembah dan jurang terbayar tatkala kedatangan kami di sekolah langsung disapa anak-anak berseragam merah putih, bersepatu rapi yang selalu mengucapkan selamat siang kepada kami secara bergantian dan sahat-sahutan.

Foto : Makhrus Yusak/Yayasan BaKTI





Kami tiba di SDI Bea Nanga Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur sekitar pukul 11.30 WITA. Setelah upacara Kepok untuk menyambut kedatangan tamu, kami kemudian diarahkan menuju ruangan pertemuan.

Di bagian depan ruang pertemuan menghadap ke arah peserta nampak deretan perempuan perempuan muda berseragam putih berpadu hitam selalu tersenyum ramah kepada kami semua yang berada dalam ruangan itu.

Tidak berapa lama kader desa yang ternyata seorang perempuan mulai membuka dan memandu acara proses penetapan hasil penilaian

bulanan, selanjutnya ketua KPL yang juga seorang perempuan yang masih muda memberikan sambutan.

Dalam sambutannya perempuan yang bernama Theresia Laut tersebut menyampaikan, bahwa sekitar delapan orang dari 11 anggota KPL adalah perempuan yang sejatinya adalah ibu rumah tangga biasa. Awalnya kami merasa risih saat melakukan penilaian bersama guru, karena merasa berpendidikan rendah. Namun karena kuatnya dukungan dari guru dan pemerintah desa akhirnya kami mampu membangun hubungan yang baik.



Foto : Makhrus Yusak/Yayasan BaKTI

“

Puji Tuhan anak-anak dari desa kami sekarang ini banyak memperoleh prestasi di tingkat Kabupaten, bahkan mewakili kabupaten untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi.

disampul rapi kepada perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manggarai Timur yang juga ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil penilaian terhadap guru dan Kepala Sekolah yang dilakukan secara bergiliran oleh semua anggota KPL.

Selesai acara semua anggota KPL ini ternyata tidak lantas pulang, mereka masih bertahan di sekolah berdiskusi dan berguru dengan para guru, membahas masalah pendidikan di desa. Mereka ini sangat aktif membantu sekolah, ujar Elfrida Jerahi Kepala sekolah SDI Bea Nanga. Terakhir kemarin kami berencana membuat Taman Bacaan Masyarakat di kampung atas, gedungnya sudah ada buku-bukunya sebagian diambilkan dari buku perpustakaan sekolah, agar bisa juga dibaca orang tua dan anak-anak, sekarang ini tinggal menunggu peresmian saja, ungkap kepala sekolah wanita tersebut bersemangat.

“KPL dan kader ini ya seperti ini, mereka bahkan sering datang ke sekolah untuk mengusulkan kegiatan sekolah seperti Kartinian bersama, mengadakan perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan, yang saya senang mereka semua didukung oleh suaminya di rumah. Para suami mereka tidak pernah protes jam berapapun mereka pulang ke rumah ketika tahu

Kami biasanya ikut upacara di sekolah, selalu datang pada kegiatan Jumat sehat di sekolah, dua kali dalam satu minggu kami berkunjung dari rumah ke rumah untuk memastikan orang tua melaksanakan janji layanan terutama mendampingi anak-anak belajar, lanjut perempuan muda tersebut bersemangat.

Puji Tuhan anak-anak dari desa kami sekarang ini banyak memperoleh prestasi di tingkat Kabupaten, bahkan mewakili kabupaten untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi. Di akhir sambutan ketua KPL kemudian menyerahkan dokumen bukti kerja mereka yang sudah

bahwa istri mereka sedang ada kegiatan di sekolah, ujar perempuan paruh baya tersebut mengakhiri pembicaraan” tambahnya lagi.

Sejak ada KIAT Guru kami menjadi sadar, bahwa mungkin seperti inilah tugas guru yang sebenarnya. Dukungan KPL, Kader Desa, Pemerintah Desa dan Kecamatan membuat kami semakin sadar bahwa mendidik anak itu bukan hanya tugas kami di sekolah saja, tetapi semua harus terlibat dan mengambil peran.

Di sekolah ini kalau kami para guru sedang rapat, anak-anak tidak kami pulangkan awal. Mereka kami arahkan ke perpustakaan sekolah untuk membaca diawasi oleh penjaga sekolah, kalau capek mereka bermain dulu baru kemudian ke perpustakaan lagi sampai kami selesai rapat atau waktunya mereka pulang.

Sekarang ini anak-anak dari sekolah kami sudah langganan memperoleh juara saat mengikuti lomba di Kabupaten, bahkan beberapa kali mewakili untuk ikut lomba di tingkat provinsi. Kami berharap kondisi seperti ini bisa terus bertahan dan meningkat sekalipun nanti KIAT

Guru sudah tidak bersama kami lagi di sini, ungkap kepala sekolah tersebut mengakhiri percakapan bersama kami.

SDI Bea Nanga memang berada jauh di pelosok Kabupaten Manggarai Timur, namun berkat kerja sama yang baik, antara sekolah dan masyarakat, didukung oleh pemerintah desa, sekolah ini mampu tumbuh menjadi sekolah yang menyenangkan dan ramah bagi siswa, kondisinya bersih, rapi dan menjadi langganan dalam mengukir prestasi siswanya.

Kami terus terbawa oleh cerita cerita kekompakan masyarakat dan sekolah SDI Bea Nanga dalam memenuhi hak anak di bidang pendidikan. Tidak terasa karena asyik berbincang waktu sudah sampai pukul lima sore, kami pun berpamitan untuk kembali. Sepanjang perjalanan pulang kabut sedang turun, jarak pandang mata kami tidak sampai 10 meter, mobil kami berjalan sangat pelan dan berhati-hati, kami pun selamat kembali sampai tujuan.

Program Rintisan KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah sangat tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dalam menilai layanan guru dan dikaitkannya pembayaran Tunjangan Khusus Guru dengan kehadiran guru atau kualitas layanan guru. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan lima pemerintah kabupaten PDT: Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur, serta Sintang, Landak dan Ketapang di Kalimantan Barat. Program ini diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pembiayaan dari Pemerintah Australia dan USAID.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Data Management Officer-Kabupaten Manggarai Timur dan dapat dihubungi melalui Email: makhrus.yusak@gmail.com. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KIAT Guru dapat menghubungi : info@bakti.or.id

Pangan Hutan yang Selamatkan Warga Aik Berik di saat Gempa Lombok

Sisa gempa masih terlihat di rumah Marwi. Dia tinggal di Aik Berik, desa yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Saat Mongabay Indonesia berkunjung di awal Februari lalu, rumah berdinding bata itu masih tampak kosong. Seisi perabot berada di halaman rumahnya.

Bagi para petani HKm Aik Berik, gempa yang terjadi pada Juli-Agustus 2018 itu memberikan pengalaman berharga pentingnya menjaga lahan garapan mereka. Hutan yang dipenuhi tanaman buah dan pangan menyelamatkan warga dari krisis pangan.

Di beberapa lokasi bencana lain, para korban harus dibantu penuh untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari mereka. Sementara warga Aik Berik, mereka beruntung bisa memetik pangan dari dalam hutan.

Talas, buah nangka, aren, dan pisang adalah bahan pangan yang bisa langsung dimakan. Dua hari setelah gempa para petani HKm sudah masuk ke dalam hutan. Mereka memetik hasil tanaman dari dalam kawasan Hkm.



<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/pangan-hutan-yang-selamatkan-warga-aik-berik-di-saat-gempa-lombok>

Adolescent pregnancy in Manggarai

The pregnant patient on the examination bed in front of us was barely a teenager. Her late-term belly did not seem to match her youthful face, which was anxious as she waited for her nurse at the puskesmas (community health center) in Cancar Village, Manggarai District, East Nusa Tenggara (NTT). A devout Catholic, this unmarried 15-year-old had become pregnant by her very first boyfriend, with whom she had never used contraception. Like many enu (the local term for 'young women') she wasn't even aware that contraceptive products existed.

Most of the Cancar Village Puskesmas's regular patients are Manggarai locals from low socioeconomic backgrounds – and all of them are Catholic. Ten minutes after we arrived, the head nurse informed us that she and her staff were expecting around five pregnant patients for routine prenatal check-ups in the next hour alone. The rate of adolescent pregnancy in Manggarai is sky high, and these pregnancies bring significant health and socioeconomic consequences for young people and their families.



<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/adolescent-pregnancy-manggarai>

Young Scholar Prize 2019

The Editorial Board of Indonesia and the Malay World (IMW) is pleased to announce a new call for submissions of original articles by young scholars to the 2019 prize. 'Young scholar' is defined by IMW as either someone in the process of completing his or her PhD or someone who has been awarded a doctorate within the last five years. The submitted article should be concerned with the languages, literatures, art, archaeology, history, religion, anthropology, performing arts, cinema or tourism of the region covered by the journal (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, southern Thailand and southern Philippines).

Submissions have to be written in good academic English to be considered and should be sent as an email attachment with the email subject header: IMW YSP + author's name, together with a brief CV, to imw@soas.ac.uk, by 1 May 2019. Any queries should be directed to Dr Mulaika Hijjas, mh86@soas.ac.uk



<https://batukarinfo.com/news/young-scholar-prize-2019>

Call for Papers: The 2nd International Conference on Disability and Diversity in Asia



The conference is hosted by the Law Faculty of Brawijaya University and jointly organized by Universitas Brawijaya Law Faculty, PSLD Universitas Brawijaya, AIDRAN and La Trobe Law School. It will take place in the city of Malang in East Java, Indonesia, on 24-25 September 2019.

Deadline for submission: 15 April 2019

Notification of acceptance: 30 April 2019

Registration: 1-30 May 2019

Deadline for final paper submission: 1 August 2019

There is no conference fee both for those who want to register as a paper presenter or to observe the conference. For more information about the conference, you can check the conference

website: <https://icdda.ub.ac.id/index.php/icdda/2019/announcement/view/4>

For any enquiries regarding the programme, please contact: icdda@ub.ac.id



<https://batukarinfo.com/news/call-papers-2nd-international-conference-disability-and-diversity-asia>

Menggaungkan Suara Marginal: Cerita dari Kawasan Timur Indonesia



Pembuatan kebijakan publik idealnya dilakukan secara integral, menyeluruh pada setiap aspek yang berpengaruh. Partisipasi publik merupakan prasyarat absolut untuk memastikan proses tersebut berjalan secara inklusif. Maka, perumusan kebijakan publik berbasis bukti, terutama dalam konteks lokal, perlu didorong dengan mendasarkan pertama-tama pada pengetahuan lokal oleh para aktor lokal.

Walaupun demikian, warga, khususnya yang terpinggirkan, tampak kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tidak jarang, suara mereka disisihkan karena dianggap tidak cukup kuat. Kehadiran organisasi masyarakat sipil, dalam hal ini, sangat penting dalam membantu menyuarakan kepentingan kelompok terpinggirkan ini. Pun, hal ini bukan tanpa persoalan. Organisasi-organisasi tersebut juga memiliki berbagai keterbatasan perihal tata organisasi mereka, termasuk dalam hal kapasitas. Satu hal yang berpengaruh dalam usaha mereka menyuarakan kepentingan kelompok marginal terdapat pada absennya data yang memadai serta kemampuan menganalisis secara sistematis, sehingga kredibilitas hasil kerja organisasi-organisasi tersebut kerap dipertanyakan.



<https://batukarinfo.com/referensi/menggaungkan-suara-marginal-cerita-dari-kawasan-timur-indonesia>

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, kunjungi :

www.batukarinfo.com



Kegiatan di BaKTI

5-6 Maret 2019

Tes dan interview seleksi Program **INSPIRASI 2019**

UnionAID kembali membuka peluang bagi organisasi masyarakat sipil di kawasan timur Indonesia untuk ikut bergabung dalam Program INSPIRASI tahun 2019. Di tahun 2019, program ini telah memperluas wilayah targetnya yang awalnya hanya di seluruh Sulawesi, Maluku dan NTT pada tahun 2018 lalu, sekarang mencakup provinsi NTB, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Program INSPIRASI (Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) adalah program belajar 6 bulan yang didukung oleh New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) dan dikelola oleh UnionAID bekerja sama dengan Yayasan BaKTI sebagai mitra di Indonesia dan Auckland University of Technology (AUT) sebagai mitra di Selandia Baru.

Sejak dibuka Call for Application mulai November 2018 hingga 17 Januari 2019 dan disebarluaskan ke seluruh kawasan timur Indonesia oleh BaKTI, sebanyak 309 aplikasi yang diterima oleh UnionAID melalui *website* tempat pendaftaran online seleksi Program INSPIRASI. Jumlah ini terbilang cukup signifikan untuk organisasi masyarakat sipil yang berada di KTI. 30 orang *shortlist* akhirnya dipilih dan diundang hadir dalam proses seleksi terakhir berupa Tes dan wawancara oleh tim panel yang dilaksanakan di 3 kota : Makassar,

22 Maret 2019

Inspirasi BaKTI “Shelter Warga - Perlindungan Perempuan dan Anak di Masyarakat”

Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, Yayasan BaKTI Makassar menggelar Diskusi Inspirasi BaKTI dengan mengangkat tema “Shelter Warga”. Shelter warga adalah inisiatif cerdas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dalam upaya penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis RT/RW secara partisipatif di Kota Makassar. Shelter warga pertama kali dikembangkan di Kota Makassar tahun 2016 di enam kelurahan dan terus diadopsi hingga akhir tahun 2019 diharapkan seluruh kelurahan di Kota Makassar telah memiliki Shelter warga.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ibu Tenri A. Palallo dan Ketua Shelter warga Kelurahan Manggala, Bapak Sabir. Dalam presentasinya Ibu Tenri mengungkapkan bahwa kehadiran shelter warga sudah banyak



Mataram dan Kupang. Pada akhirnya hanya 10 orang yang dipilih menjadi peserta program INSPIRASI dan berangkat ke Selandia Baru pada akhir bulan Juni 2019.

Proses pelaksanaan tes dan *interview* Di Kota Makassar diadakan di ruang pertemuan Kantor BaKTI pada tanggal 5-6 Maret 2019. Hari pertama tanggal 5 Maret, diikuti oleh 9 orang kandidat berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua. Hari kedua tanggal 6 Maret, diikuti oleh 9 orang berasal dari Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Barat. Tim seleksi program INSPIRASI 2019 di Kota Makassar sendiri terdiri dari Michael Naylor dan Laila Harre dari UnionAID, Mike Ingriani dari New Zealand Embassy di Jakarta, Zusanna Gosal dan Sheryl Heumasse dari BaKTI serta 3 orang Alumni program INSPIRASI 2018 dari Sulawesi Selatan yakni Fauzan Azizie, Andi Arifayani dan Rezky Pratiwi.



menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat. Tidak hanya itu, persoalan sosial lain juga ikut diselesaikan misalnya kasus pencurian dan penyebaran berita hoax. Shelter Warga awal didirikan tanpa modal, warga yang mempunyai misi yang sama dalam mengendalikan kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya kemudian dilibatkan. Sebagai bentuk tanggung jawab, DP3A Kota Makassar mengalokasikan dana operasional sebesar 600 ribu per bulan kepada shelter-shelter yang aktif. Pemerintah juga membentuk *social security* yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar dimana RT/RW akan mendapatkan insentif senilai 1 juta rupiah apabila kelurahannya bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 73 orang berasal dari kalangan pemerintah daerah, LSM, media, akademisi, dan masyarakat umum.



Berbuat untuk Penyambung Generasi: Menggagas Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

PENULIS Siswan dkk.

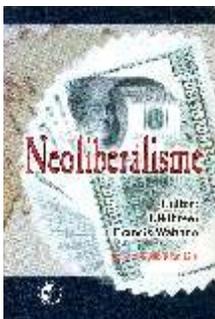
Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap orang berhak untuk mengakses pelayanan kesehatan, tak terkecuali perempuan. Meskipun fasilitas layanan kesehatan untuk ibu hamil dan perempuan telah tersedia, tak serta merta perempuan dapat mengaksesnya. Buku ini hadir untuk memberikan gagasan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak agar dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak.



Hak Asasi Manusia, Yang Muda Kini Bicara

PENERBIT Jurnal Perempuan

Buku ini membahas secara detail dari apakah pentingnya Hak Asasi Manusia, sejarahnya, hingga problem anak muda yang masuk ke dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak hanya membahas problem HAM, buku ini juga membahas tentang keterkaitan antara problem gender, perempuan, anak muda, dan HAM. Keberadaan buku ini menjadi bukti bahwa kepedulian anak muda sangat tinggi untuk membahas persoalan HAM dan Gender.



Neoliberalisme

PENULIS I. Wibowo & Francis Wahono.

Buku ini menyajikan berbagai artikel yang mengupas lebih jauh neoliberalisme dengan studi kasus Indonesia. Diawali dengan melacak akar dan logika neoliberalisme, selanjutnya pembaca diajak tersadar betapa dahsyatnya dampak dari hegemoni neoliberalisme bagi bangsa ini. Bukan kebebasan dan kemakmuran yang kita dapatkan melainkan hancurnya tatanan dalam seluruh aspek kehidupan.



Menata Ulang Praktek *Good Governance* di Indonesia

PENERBIT Akatiga

Hingga saat ini program dan kebijakan pemerintah dinilai belum memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah tampaknya tidak kuasa untuk tidak melayani dan memenuhi kepentingan-kepentingan asing dengan mengatasnamakan *good governance*, daripada melayani dan melindungi kepentingan rakyat. Buku ini menampilkan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas mengenai penataan ulang *good governance* di Indonesia.